

Kebut Infrastruktur, Pemko Banjarmasin Minta Rp300 Miliar di APBN 2020



<https://kalsel.prokal.co/read/news/22344-untuk-pembangunan-infrastuktur-2020-pupr-banjarmasin-butuh-rp300-miliar>

Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah meminta, agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang didanai bersumber dari APBD 2020 dijadikan skala prioritas khususnya untuk wilayah pinggiran untuk direalisasikan.

Harapan itu disampaikan karena ia menilai, pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarmasin dirasakan masih belum merata. Fakta itu setidaknya terlihat, masih adanya sejumlah kelurahan di ibukota Provinsi Kalsel ini yang sampai sekarang belum tersentuh .

“Seperti pembangunan perbaikan jalan atau jembatan, khususnya yang berada di wilayah pinggiran,” kata Aliansyah.

Aliansyah mengatakan, menyikapi belum merata pelaksanaan pembangunan cukup menjadi perhatian serius pihak dewan. Sehingga dalam APBD tahun 2020 mendatang diprogramkan sejumlah pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan.

(Diringkas dari <https://kalimantanpost.com/2019/12/2020-pembangunan-infrastruktur-diminta-jadi-skala-prioritas/>)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur melalui bantuan APBN pada 2020. Kepala Dinas

PUPR Banjarmasin, Arifin Noor, mengatakan sudah meminta tambahan Rp 300 miliar ke Kementerian PUPR untuk proyek infrastruktur pada 2020.

"Sudah kami ajukan dan sementara masih menunggu persetujuan. Jika disetujui, maka ini akan menambah amunisi kekuatan Banjarmasin dalam hal mengembangkan kota dari segi infrastruktur," ucap Arifin kepada wartawan banjarhits.id, Zahidi, Kamis (14/3).

"Apapun jalannya, baik dari alokasi DAK maupun DAU kita harus upayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkannya agar pembangunan atau perawatan dari segala bidang infrastruktur yang masih belum terpenuhi, akan kami penuhi secara maksimal," kata Arifin Noor.

Selain membidik APBN, Arifin turut melobi ke Pemprov Kalimantan Selatan agar ada sinergi bantuan ke Banjarmasin dalam APBD Provinsi Kalsel. Apabila sharing pendanaan ini sesuai target, Arifin optimis pembangunan infrastruktur bisa maksimal.

(Diringkas dari <https://kumparan.com/banjarhits/kebut-infrastruktur-pemko-banjarmasin-minta-rp300-miliar-di-apbn-2020-1552613392996294206>)

Demi pembangunan di ibukota, PUPR kota ini sebenarnya tak cuma mengincar dana APBN. Tapi juga bantuan dari Pemprov Kalsel, melalui APBD-nya. "Suntikan dana ini sangat penting mempercepat pembangunan di Banjarmasin," katanya.

Tanpa sokongan dana dari pemerintah pusat dan provinsi itu, Arifin pesimis. Karena mustahil mengembangkan infrastruktur secara maksimal.

Suntikan dana tersebut juga untuk menyelesaikan visi dan misi wali kota dan wakilnya. Terutama di bidang infrastruktur. Salah satu contoh, rencana pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Bromo dengan Mantuil. Dan tentu saja masih banyak pekerjaan lainnya.

Jika berharap pada APBD pemko, khususnya dana yang ada di Dinas PUPR, tentu saja berat untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Tahun ini saja alokasi anggaran yang ada di dinas ini cuma Rp273 miliar.

Uang segitu untuk menangani enam bidang infrastruktur. Seperti jalan, penerangan jalan umum (PJU), sungai, drainase, cipta karya dan jasa kontruksi, tata ruang serta jembatan.

Tahun ini, PUPR memang dapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Nilainya mencapai Rp23 miliar. Namun lebih banyak digunakan untuk penanganan jalan. "Kalau dari usulan musrenbang dan usulan dari DPRD, alokasi anggaran penanganan infrastruktur

mencapai Rp2 sampai Rp3 triliun. Tapi setelah digodok secara matang, dan disesuaikan pula dengan belanja modal pemko, ketemu di angka Rp273 miliar,” papar Arifin.

Salah satu proyek yang memakan anggaran besar, adalah perampungan RSUD Sultan Suriansyah. Untuk tahap ketiga, pembangunan gedung berlantai 5 ini pemko harus mengeluarkan dananya sebesar Rp79 miliar.

"Bangunan yang sudah ada pun akan dilakukan perawatan. Karena kami tak ingin setelah difungsikan nanti, ada keluhan terkait infrastrukturnya,” tambah mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kalsel itu.

Jika mengacu angka-angka di atas, pemko memang butuh uang. Untuk pembangunan dan pengembangan infratraktur di Banjarmasin. Angkanya, cukup realistis.

(Diringkas dan dikutip dari <https://kalsel.prokal.co/read/news/22344-untuk-pembangunan-infrastuktur-2020-pupr-banjarmasin-butuh-rp300-miliar>)

Sumber Berita:

1. <https://kumparan.com/banjarhits/kebut-infrastruktur-pemko-banjarmasin-minta-rp300-miliar-di-apbn-2020-1552613392996294206>, Jumat, 15 Desember 2019.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/22344-untuk-pembangunan-infrastuktur-2020-pupr-banjarmasin-butuh-rp300-miliar>, Senin, 18 Maret 2019.
3. <https://kalimantanpost.com/2019/12/2020-pembangunan-infrastruktur-diminta-jadi-skala-prioritas/>, 12 Desember 2019.

Catatan:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi

berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan,

teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.

- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.